



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

LAPORAN HASIL SURVEI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

WORKSHOP STUDI LIKUIDITAS
KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)

Dr. Ahmad Subagyo

(Coop and SMEs Expert)

SEMARANG, 17 NOVEMBER 2020

STRUKTUR PEMBAHASAN

1. Pendahuluan
2. Metodologi penelitian
3. Kajian pustaka
4. Hasil temuan & analisis
5. Kesimpulan dan rekomendasi



— PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

- Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Economic Growth Support Activity (EGSA) - USAID untuk memberikan dukungan bagi koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas selama masa pandemi dalam bentuk kajian yang berisi analisis untuk koperasi koperasi lain yang tidak mendapatkan bantuan di bawah naungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
- Studi pustaka dan survei telah dilaksanakan sejak bulan September – Oktober 2020 di 2 (dua) Provinsi yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.



— METODOLOGI PENELITIAN



METODOLOGI

Tujuan kajian:

1. Memberikan dukungan data dan analisis dalam pengambilan kebijakan untuk koperasi yang tidak bernaung di bawah bimbingan LPDB. Kementerian Koperasi dan UKM akan memberikan fasilitasi kebijakan di masa depan.
2. Memberikan gambaran secara umum tentang skema usaha dan langkah-langkah yang diambil koperasi yang terdampak pandemi.
3. Mendukung koperasi dengan analisis yang kuat untuk melakukan restrukturisasi usaha dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang

Hipotesis Kebijakan:

1. Mengubah faktor input-output koperasi (anggota)
2. Mengubah faktor permodalan (eksternal)
3. Mengubah faktor sistem operasi (bimbingan teknis-teknologi)
4. Mengubah faktor infrastruktur lembaga penunjang koperasi

OBJEK STUDI DAN LOKASI

Persyaratan Koperasi Responden:

1. Koperasi memiliki izin usaha simpan pinjam yang beroperasi di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Koperasi tidak mendapatkan bantuan likuiditas/pinjaman dari LPDB selama pandemi
3. Bersedia untuk menjadi responden dalam survei
4. Mendapatkan rekomendasi dari Kemenkop atau Dinas Koperasi provinsi/kabupaten

Lokasi Responden:

1. Jawa Timur:
 - a. Kota Surabaya
 - b. Kabupaten Sidoarjo
 - c. Kota Malang
 - d. Kabupaten Bojonegoro
2. Sulawesi Selatan
 - a. Kabupaten Bulukumba
 - b. Kota Makassar

4 PERTANYAAN KUNCI

1. Apa saja regulasi yang mendukung kelembagaan KSP?
2. Apakah koperasi memiliki izin usaha simpan pinjam dan memiliki struktur & infrastruktur pendukung internal kelembagaannya?
3. Bagaimana kinerja keuangan, khususnya likuiditas KSP saat pandemi?
4. Lembaga apa saja yang memberikan dukungan usaha simpan pinjam koperasi di daerah?



METODE PENGUMPULAN DATA

STUDI PUSTAKA:

- Regulasi perkoperasian
- Laporan publikasi
- Penelitian sebelumnya yang relevan

SURVEI

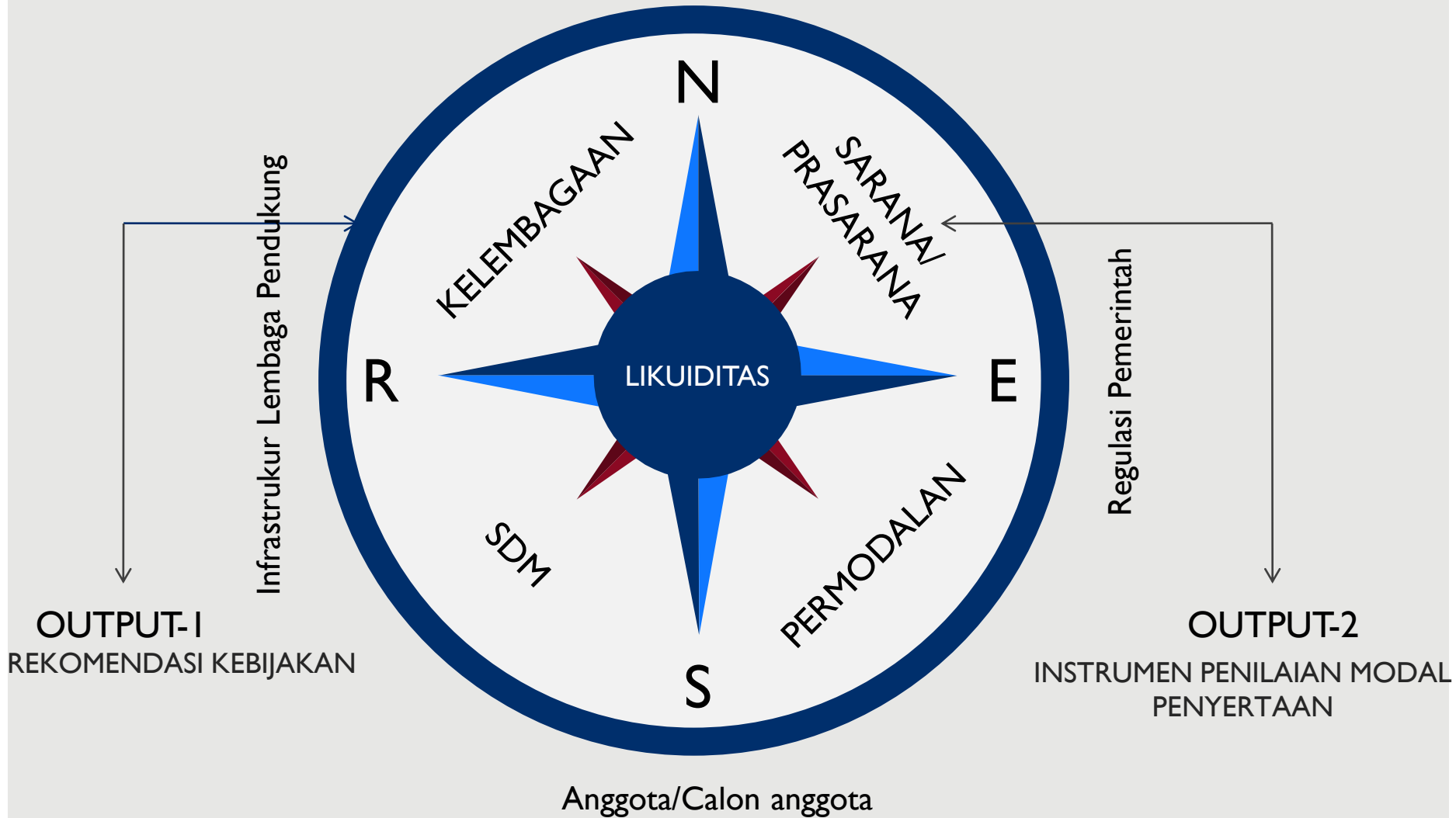
- Wawancara responden
- Wawancara ahli koperasi
- Wawancara pejabat Kemenkop
- Wawancara pejabat Dinas Koperasi

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD):

- Pengurus koperasi responden
- Pengawas koperasi responden
- Pegawai Dinkop
- Penyuluh/Pendamping Koperasi

OUTPUT STUDI

Koperasi Sekunder/Asosiasi



KOPERASI RESPONDEN JAWA TIMUR (I)

1. KSP Sukses Karya Bersama

- Berdiri tahun 2014 dan mendapatkan izin operasional tahun 2015 dari Dinas Koperasi Kabupaten Pacitan No. 30/SIUSP/XII/408.3/2015.
- Alamat: Jl.HOS Cokroaminoto No.30 Pucangsewu, Pacitan
- Ketua: Hadi Suyono

2. KSP Usaha Kesejahteraan Keluarga

- Berdiri 17 Oktober 2002 dan mendapatkan izin operasional tahun 2002 dari Dinas Koperasi Kabupaten Pacitan No. 64/BH/418.3.1/X/2002.
- Alamat: Jl. S Parman No.44 Pucangsewu, Pacitan
- Ketua: Heri Setijono

KOPERASI RESPONDEN JAWA TIMUR (2)

3. KSP Sentosa

- Berdiri 8 September 2005 dan mendapatkan izin dari Dinas Koperasi Kabupaten Pacitan No. 87/BH/408.34/3.I/IX/2005.
- Alamat: Jl. Panglima Besar Sudirman No. 115, Pacitan
- Ketua: Bambang Satrijo

4. KSP Mulya Dana Mandiri

- Berdiri 18 Februari 2003 dan mendapatkan izin operasional tahun 2003 dari Dinas Koperasi Kabupaten Pacitan No. 68/BH/418.34/3.I/II/2003.
- Alamat: Jl. Maghribi No.31A Menadi, Pacitan
- Ketua: Suyono

KOPERASI RESPONDEN JAWA TIMUR (3)

5. KSP Berkah Sesama Jati

- Alamat: Jl.Simpang Panji Suroso-Terminal Arjosari Blok C 6-7 Arjosari-Malang
- Ketua:Ari wantoro

6. Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur

- Alamat: Jl.Raya Sengkaling No. 293, Dau, Malang, Jawa Timur
- Ketua: Untung Endro Cahyono

KOPERASI RESPONDEN SULAWESI SELATAN (I)

I. KSP Dipar Jaya

- Ketua: H.Usman
- BH.No. 03/BH.UKM20.3/IX/2005
- SIUSP No. 5/13.01/2020
- Jl.Pongtiku No. 47, Makassar

2. KSPPS Bakti Huria

- Ketua: H.Andi Amri
- Badan hukum No. 14/DK-UKM.20.3/XII/2003
- SIU No. 3/B.01/PTSP/2020
- Jl. Mallengkeri Raya No.34 Makassar

KOPERASI RESPONDEN SULAWESI SELATAN (2)

3. KSP Gemilang

- Ketua; Bp. Hulman Napitupulu
- Badan Hukum No. 02/BH/XXIV/II/2008
- Jl. Daeng Tata Raya, Ruko Arthalia No. 3A, Makassar

4. KSP Malommo Jaya Abadi

- Ketua: Samsudin Etta
- Badan Hukum No. 001552/BH/M.KUKM.2/VI/2016
- SIUSP: No. 4/B.01/PTSP/2020
- Jl. Jipang Raya Blok A3/26

KOPERASI RESPONDEN SULAWESI SELATAN (3)

5. Kopwan Tani

- Ketua: Ibu Nur Asiyah
- Berdiri tahun 2001
- Anggota 395 orang
- Aset Rp 1,6 M
- NPL +/- 30%

6. Koperasi Chaerul Umam

- Badan Hukum No. 196/BH/KP3E-KOP/XI/2010
- Jannaya Desa Lembanna Kec Kajang
- Kredit Macet +/- 50%
- Aset Rp 130 juta

KOPERASI RESPONDEN SULAWESI SELATAN (4)

7. Koperasi Karyawan PLN

- Ketua: H.Abdul Aziz
- Berdiri tahun 1985
- Total asset Rp 5M
- Kredit macet Rp. 1,3M
- Belum ada izin USP

— STUDI PUSTAKA



KONDISI KOPERASI SAAT INI

- Koperasi saat ini didominasi oleh usaha simpan pinjam sebesar 52,7% dari total 123.048 unit. KSP sebagai tolak ukur kinerja koperasi secara nasional, sehingga baik buruknya koperasi tercermin pada kinerja KSP secara nasional.
- Berdasarkan hasil survei Kemenkop UKM per April 2020, dilaporkan bahwa dampak pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya penurunan tabungan sebesar 11%, beban usaha naik sebesar 11,5%, volume pinjaman turun sampai 17,69%, dan SHU turun sampai 39,89%.
- Kebutuhan bantuan likuiditas untuk koperasi diestimasikan sebesar Rp3,2 triliun untuk 14.791 koperasi dengan koperasi yang layak sebanyak 2.465 unit.

KONDISI KOPERASI SAAT INI

Era Mismatch

- Mismatch = ketidaksesuaian, ketidakcocokan, ketidakseimbangan dana, di Lembaga Keuangan (LK) dan KSP akan jamak terjadi. Adanya kecenderungan penarikan dana (cash-out) secara masif tanpa disertai dengan adanya penghimpunan dana (cash-in) yang memadai akan menimbulkan kesulitan dana berupa *deficit cash flow* di LK.
- LK atau KSP yang memiliki manajemen risiko yang baik akan dapat memitigasi terjadinya *mismatch* ini, sebaliknya LK yang tidak memiliki manajemen risiko dan tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai akan berakibat fatal, yaitu kebangkrutan.

Tiga Kondisi yang Dihadapi KSP:

- Well prepared. Mereka sudah memiliki mitigasi risiko yang baik. KSP ini memiliki *standby loan* dari LK lain, memiliki aset likuid yang memadai, sehingga relative stabil dan terkendali.
- Less control. Mereka tidak memiliki manajemen risiko namun memiliki reputasi yang baik, sehingga masih dapat kepercayaan dari pihak lain dalam mengendalikan likuiditasnya.
- Break out. KSP ini sebelumnya memang sedang bermasalah, terutama masalah keuangan yang disebabkan “salah urus” manajemen mereka. Contoh: mereka memiliki kredit fiktif, kredit topengan, *fraud*, dan sebagainya.

KORELASI MODEL BISNIS DAN TINGKAT KEGAGALAN

- Koperasi di Indonesia terdiri dari 7 model bisnis (Bank Dunia, 2016). Berdasarkan karakteristiknya, hanya ada 2 model yang masuk dalam kategori koperasi *well prepared*, yaitu (1) Credit Union dan (2) Tanggung Renteng. Ada 2 kunci utama yaitu sistem keanggotaan dan sumber permodalan mereka.
- Model yang masuk katagori kedua (Wave and Storm) yaitu model bisnis Baitul Maal wa tamwil (BMT). Model bisnis memiliki ciri khas berbasis komunitas dan memiliki jaringan (kerjasama antar koperasi) yang relatif kuat.
- Ada satu model bisnis yang sangat rentan terhadap kebangkrutan, yaitu kuasi bank. Model bisnis ini seperti perbankan, yaitu sumber dana terbesar dari non-anggota, pinjaman bank, dan lembaga keuangan lain, dan pembiayaan diberikan dalam bentuk individual berbasis pada mekanisme pasar.
- Sasaran terbesar pembiayaan/pinjaman dari model bisnis ini adalah UKM. Model bisnis ini lebih dikendalikan oleh individual dan tidak didukung dengan adanya transparansi baik laporan maupun pertanggung jawabannya. Sebagian besar dananya disalurkan untuk investasi yang tidak mempertimbangkan manajemen portofolio.

— FINDING & ANALYSIS

Hasil Kajian Regulasi



DUKUNGAN REGULASI UNTUK KSP

UNDANG-UNDANG

- UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

PERATURAN PEMERINTAH

- PP No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan

PERATURAN MENTERI

- Permenkop No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan
- Permenkop No. 11 Tahun 2015 tentang Juklak Modal Penyertaan
- Permenkop No. 13 Tahun 2015 tentang Akuntansi KSP
- Permenkop No. 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- Permenkop No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- Permenkop No. 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
- Permenkop No. 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat SDM

DUKUNGAN REGULASI UNTUK KSP

PERATURAN MENTERI

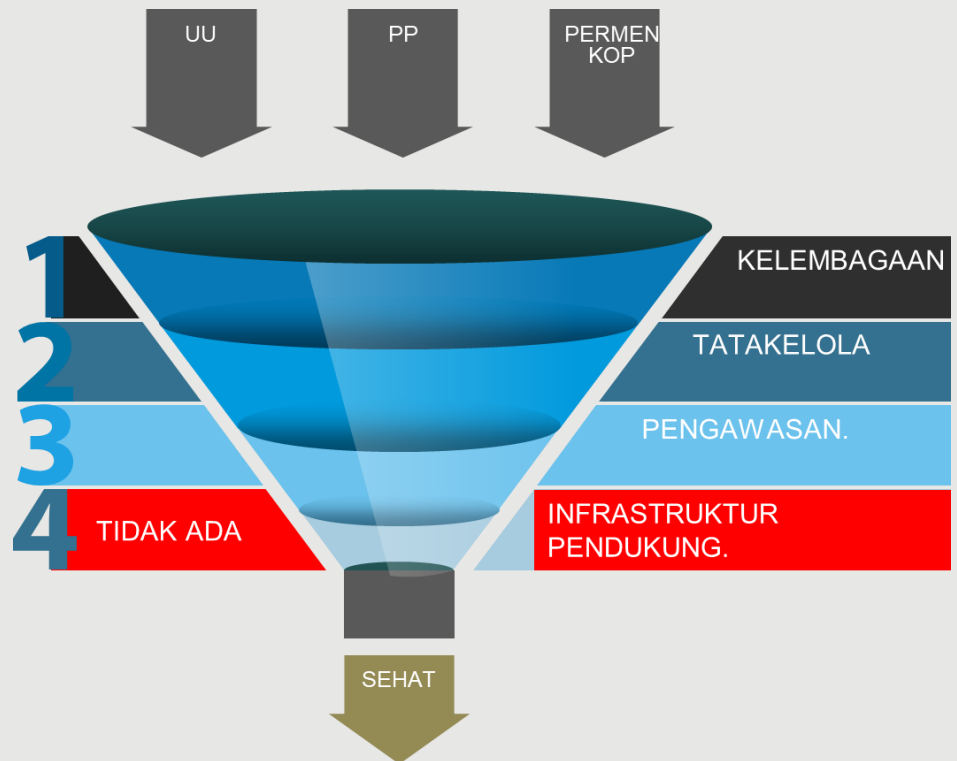
- Permenkop No. 19 Tahun 2015 tentang Rapat Anggota Koperasi.
- Permenkop No. 20 Tahun 2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi
- Permenkop No. 21 Tahun 2015 tentang Pemingkatan Koperasi
- Permenkop No. 22 Tahun 2015 tentang Koperasi Skala Besar

PERATURAN MENTERI

- Perdep No. 6 Tahun 2016 tentang Penilaian Kesehatan KSP
- Perdep No. 7 Tahun 2016 tentang Penilaian Kesehatan KSPPS
- Permenkop No. 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
- Permenkop No. 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi

ANALISIS REGULASI

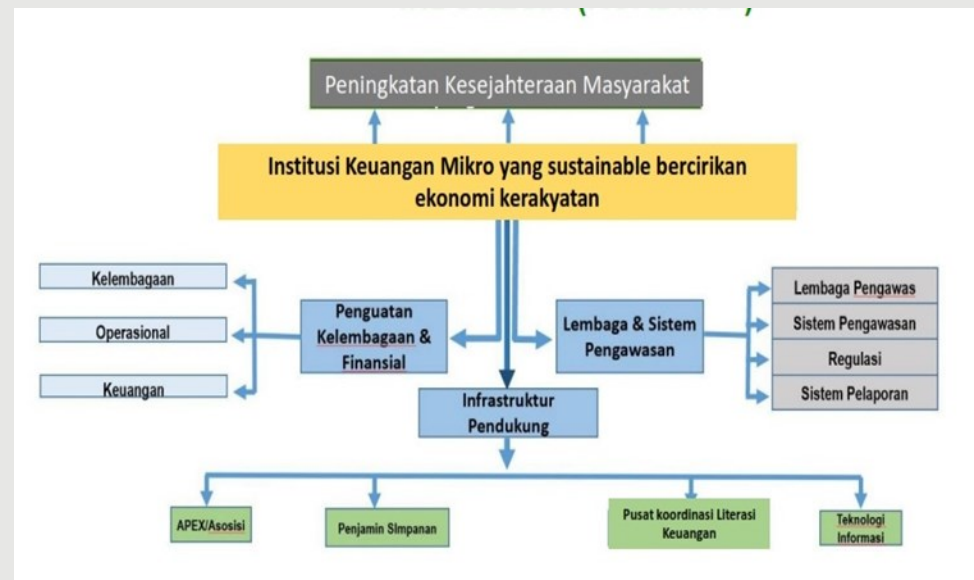
Koperasi sebagai entitas legal dan juga sebagai entitas social yang sifat kelembagaannya sebagai organisasi yang mengatur dirinya sendiri (*self regulatory organization*), kurang didukung dengan regulasi internal dan eksternal (kementerian teknis) dalam membangun infrastruktur kelembagaan. Contoh: (1) Penyediaan Pusat Data & Teknologi Informasi, (2) Pemingkatan Profesional, (3) Pembentukan APEX, dsb.



REGULATORY DEVELOPMENT

Koperasi tidak memiliki infrastruktur pendukung, sedangkan KSP sebagai sebuah lembaga keuangan memerlukan ekosistem (lembaga pendukung) yang mendukung keberlangsungan lembaganya dalam jangka panjang. Minimal ada 4 lembaga pendukung, yaitu:

- APEX Koperasi
- Penjamin Simpanan
- Pusat Literasi Koperasi
- Teknologi Informasi (Pusat Data)



TEMUAN SURVEI DUKUNGAN REGULASI UNTUK KOPERASI KABUPATEN/PROVINSI

Ada beberapa temuan terkait Kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pengembangan koperasi, yaitu:

- Kabupaten Pacitan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dana Bergulir yang memberikan pinjaman kepada koperasi;
- Provinsi Jawa Timur Memiliki UPT Dana Bergulir yang memberikan pinjaman kepada koperasi baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
- Provinsi Jawa Timur membentuk Komite Pengendalian KSP yang mendapatkan dukungan APBD. KLIK

TEMUAN SURVEI KOPERASI PROVINSI

- Provinsi Jawa timur memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dana Bergulir yang memberikan pinjaman kepada Koperasi;
- Semua koperasi responden telah memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi
- Koperasi nasional terbuka untuk beroperasi di wilayah provinsi, namun dengan ketentuan dan persyaratan
- Provinsi Jawa Timur membentuk Komite Pengendalian KSP yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dengan beranggotakan dari Dinas/Perguruan Tinggi/Dekopin/koperasi sekunder.
- Koperasi Provinsi di Jawa Timur sudah menggunakan Program Aplikasi computer dengan *core system* online. Kondisi koperasi di provinsi Sulawesi Selatan belum ada yang menggunakan aplikasi berbasis online.
- Semua koperasi di tingkat provinsi telah mendapatkan penilaian kesehatan dari Dinas Koperasi setempat.

REKOMENDASI REGULASI PEMERINTAH PUSAT

- Teknologi informasi: Kebijakan Kemenkop dalam melakukan sertifikasi penyedia teknologi *core system* koperasi
- Governance: Kebijakan Kemenkop dalam penggunaan Sertifikat Penilaian Kesehatan dalam layanan terhadap Koperasi
- Sumber Daya Manusia (SDM): Kebijakan penggunaan sebahagian Dana SHU untuk pengembangan SDM Pengelola
- Permodalan dan likuiditas: Mandatory pembentukan APEX (Koperasi Sekunder)

REKOMENDASI REGULASI PEMERINTAH DAERAH

- Permodalan: Kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk mendirikan UPT Dana Bergulir memberikan stimulus pinjaman dalam upaya membantu likuiditas KSP yang terdampak
- SDM: Pendidikan dan Pelatihan SDM Pengawas Koperasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten
- Teknologi: Penyediaan Penilaian Kesehatan berbasis online
- Kelembagaan: Pelaksanaan Ijin Usaha Simpan Pinjam dan surveilensi perijinan.

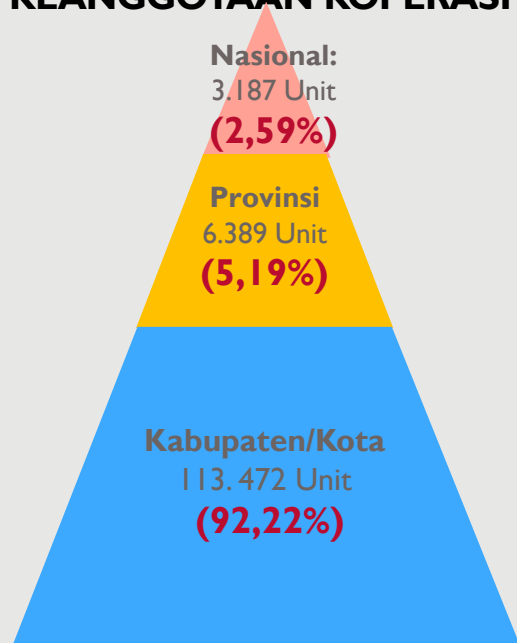
— FINDING & ANALYSIS

Hasil Kajian Kelembagaan Perijinan – Produk/Layanan



DATA KOPERASI

WILAYAH KEANGGOTAAN KOPERASI



Total koperasi : **123,048**
unit

Total koperasi bersertifikat NIK : **35,761**
unit

KONTRIBUSI KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN



Jumlah Tenaga Kerja Koperasi: 614.997 Orang



Jumlah Anggota Koperasi: 22.463.738 Orang



PDB Koperasi sebesar 5,1% terhadap PDB Nasional

JUMLAH KOPERASI BERDASARKAN JENIS KOPERASI

JENIS KOPERASI	KOPERASI AKTIF BER-NIK (UNIT)	KOPERASI AKTIF BERSERTIFIKAT NIK (UNIT)
Koperasi Produsen	5,973	1,436
Koperasi Simpan Pinjam	72,793	22,541
Koperasi Pemasaran	3,254	553
Koperasi Jasa	24,593	3,504
Koperasi Konsumen	16,435	7,817

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM (2019)

JUMLAH KOPERASI BERDASARKAN SEKTOR

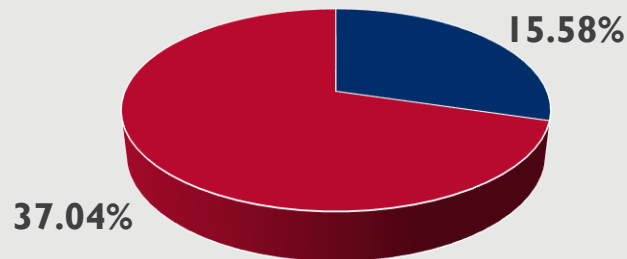
JENIS KOPERASI	KOPERASI AKTIF BER-NIK (UNIT)	KOPERASI AKTIF BERSERTIFIKAT NIK (UNIT)
Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	11,700	3,421
Industri Pengolahan	674	202
Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	45	13
Konstruksi dan bangunan	76	31
Perdagangan besar dan eceran-reparasi kendaraan	1,631	620
Penyediaan akomodasi dan makan-minum	12,718	1,129
Informasi dan komunikasi	1,090	20
Jasa keuangan dan komunikasi	57,263	28,474

JENIS KOPERASI	KOPERASI AKTIF BER-NIK (UNIT)	KOPERASI AKTIF BERSERTIFIKAT NIK (UNIT)
Pertambangan dan penggalian	189	33
Jasa Pendidikan	5	21
Pengadaan listrik dan gas	80	39
Jasa Perusahaan	294	170
Jasa Kesehatan dan kegiatan social	39	17
Transportasi dan pergudangan	710	254
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social	17	11
Jasa lainnya	36,450	1,290
Real Estate	18	6

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM (2019)

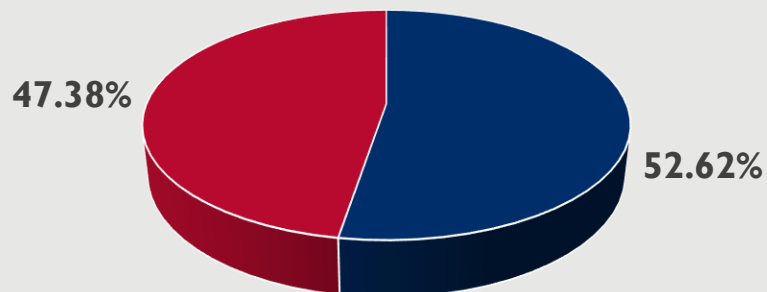
PETA KOPERASI INDONESIA

Jumlah Koperasi berdasarkan Ijin Usahanya



■ Koperasi simpan pinjam ■ Unit Simpan Pinjam (USP)

Jenis Koperasi berdasarkan bidang usahanya



■ KSP ■ NON-KSP

Jumlah Koperasi di Indonesia berdasarkan sumber dari Kemenkop (2019) sebanyak **123.048 unit**.

Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam sebanyak **64.747 unit**.

Terdiri dari **19.170 Koperasi Simpan Pinjam (KSP)** dan **45.576 Unit Simpan Pinjam (USP)**.

Sumber : Data Olahan Peneliti (2020)

TEMUAN SURVEY: PERIZINAN

KOPERASI KABUPATEN:

Semua Koperasi responden telah memiliki **Ijin Usaha Simpan Pinjam (USP)** yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan, kecuali di Kabupaten Bulukumba pelaksanaan Ijin USP belum ada.

KOPERASI PROVINSI:

Semua koperasi responden telah memiliki **Ijin Usaha Simpan Pinjam (USP)** yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi.

Berdasarkan hasil survey tersebut, rekomendasi terkait bidang perijinan adalah:

1. Menjadikan Ijin USP sebagai pintu masuk untuk membuat ***komitmen bersama*** antara pengurus-pengawas dalam pernyataan integritas untuk mengelola usaha dan organisasi secara baik & benar. klik
2. Memastikan seluruh struktur dan infrastruktur terpenuhi. KLIK

TEMUAN SURVEY: LAYANAN DAN PENGEMBANGAN

PRODUK & LAYANAN:

- Produk Koperasi di Kabupaten bersifat generic yaitu simpanan sukarela dan pinjaman; tidak ada varian produk turunan baik simpanan maupun pinjaman.
- Koperasi Provinsi khususnya di SYARIAH, semua memiliki varian produk turunan, sehingga DPK koperasi *relative* tinggi.

TEKNOLOGI INFORMASI:

- Semua Koperasi responden tingkat Kabupaten belum ada yang memiliki aplikasi akuntansi di komputer dalam mengoperasikan pembukuan dan layanannya.
- Koperasi provinsi hanya di Jawa timur yang sudah memiliki aplikasi akuntansi computer dan berbasis online.

SUMBER DAYA MANUSIA:

- Semua manajer KSP di Kabupaten belum memiliki **sertifikat kompetensi** dari BNSP.
- Baru sekitar 20% manajer KSP di Provinsi memiliki **sertifikat kompetensi** dari BNSP.
- Pendidikan untuk pengelola koperasi masih berbasis pada sisi *supply* belum pada tahap sisi *demand*, bagi koperasi dalam pengembangan sumber daya manusia mereka.

Berdasarkan hasil survey tersebut, rekomendasi terkait bidang layanan dan pengembangan adalah:

1. Menerbitkan buku panduan pengembangan produk koperasi
2. Memberikan sertifikasi kepada provider IT dalam memberikan Layanan Komputerisasi sistem akuntansi koperasi;
3. Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi bagi pengurus dan pengelola koperasi
4. Perijinan product line koperasi ke dinas

— FINDING & ANALYSIS

Hasil Kajian Bidang Permodalan



PERMASALAHAN LIKUIDITAS KSP TINGKAT NASIONAL



Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi

Merupakan badan usaha koperasi yang menghimpun simpan dan menyalurkan pinjam/pembiayaan syariah dari dan untuk anggota/calon anggota koperasi dengan imbalan dapat berupa bunga atau bentuk lain antara lain bagi hasil

1. Produk Usaha Simpanan Pinjam

- **Tabungan/Simpanan Berjangka**, dengan bunga yang ditetapkan oleh Rapat Anggota dan umumnya antara 0,3% - 1,2% perbulan.
- **Pinjaman**, dengan bunga yang ditetapkan oleh Rapat Anggota dan umumnya antara 1% - 2,5% perbulan

2. Produk Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

- **Tabungan Wadiah**, tanpa imbalan, namun dapat diberikan bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.
- **Sumpanan Berjangka Mudharabah**, imbalan bagi hasil (60:40)
- **Pinjaman Qord**, tanpa imbalan
- **Pembiayaan Mudharabah**, dengan imbalan bagi hasil (60:40)
- Pembiayaan lain dengan prinsip jual beli dan sewa-menyewa dengan margin imbalan 1% - 3 % perbulan

DAMPAK COVID 19

Aspek Usaha

Berhenti angsuran pinjaman/pembiayaan :

- Kesulitan akses ke lokasi
- Usaha tutup/berhenti
- Pendapatan anggota menurun
- Digunakan kebutuhan harian
- Himbauan Pemerintah/Desa/LSM

Ditariknya tabungan/simpanan berjangka :

- Digunakan kebutuhan harian
- Persediaan dana tunai
- Khawatir Koperasi tutup
- Takut Simpanan tidak dapat ditarik

Keuangan

Aspek Usaha	KSP	KSPPS
Tabungan	-0,62%	-10,71%
Simpanan Berjangka	-6,89%	-11,71%
Beban Usaha	+11,53%	+2,51%
Volume Pembiayaan	+17,69%	-11,30%
Hasil Usaha	-39,89%	-17,13%

NPL/NPF Gross

Januari 2020	NPL : 10,62%	NPF : 6,65%
Maret 2020	NPL : 14,91%	NPF : 11,08%

Data Survey 715 Kop
Deputi Pembiayaan, April 2020

KEBUTUHAN BANTUAN LIKUIDITAS

KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi (Desember 2019)

1. Jumlah	:	16.435 Unit
2. Tenaga Kerja	:	153.434 Orang
3. Anggota	:	11.210.416 Orang
4. Aset	:	Rp 51.495.070.568.743
5. Modal Sendiri	:	Rp 20.636.769.574.877
6. Modal Luar	:	Rp 30.858.300.993.866
7. Volume Usaha	:	Rp 58.638.402.357.409

Kebutuhan Bantuan Likuiditas

Asumsi diberikan = 14.791 Koperasi Layak/Cukup Layak*)
Terdiri 2.465 Koperasi Layak
12.326 Koperasi Cukup Layak
Rata-rata Tabungan + Simpanan Berjangka = 473.131.949**)
Bantuan Likuiditas
30% X Rp 473.131.949 X 2.465 Unit = 349.916.561.182
50% X Rp 473.131.949 X 12.326 Unit = 2.915.971.343.181
Kebutuhan Bantuan Likuiditas : Rp **3.265.887.904.362**
*) antara lain menggunakan NPL Gross
**) menggunakan hasil survei 207 KSPPS/USPPS

KONDISI KEUANGAN KOPERASI NASIONAL DI ERA PANDEMI COVID-19

ASPEK NPL

KSP		KSPPS	
2019	10,6%	2019	6,6%
2020	14,9%	2020	11,1%

- NPL mengalami kenaikan signifikan rata-rata 5%.
- Posisi NPL sehat dalam industry keuangan adalah < 5%.

NPL=Non-Performing Loan adalah rasio pinjaman bermasalah dibagi dengan outstanding pinjaman

KSPPS: Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

ASPEK SIMPANAN

KSP	KSPPS
-0,62%	-10,71%

Simpanan mengalami penurunan akibat terjadinya penarikan dan pencairan simpanan jangka panjang koperasi.

ASPEK PINJAMAN

KSP	KSPPS
+17,6%	-11,3%

Volume pembiayaan di KSPPS mengalami penurunan signifikan sampai -11,3%, kondisi ini seiring adanya penurunan dana masuk dan turunnya likuiditas Koperasi.

KINERJA KEUANGAN RESPONDEN

POSISI KINERJA PER -31 DESEMBER 2019

No.	NAMA KOPERASI	RENTABILITAS	LIKUIDITAS	PERMODALAN
1	KSPPS Kanindo Jatim	1,47%%	29,26%	21,79%
2	KSP Berkah Sesama Jatim	10,97%	34,13%	26,94%
3	KSP sukses Karya Bersama, Pacitan	2,59%	0,50%	20,42%
4	KSU Usaha Kesejahteraan Keluarga	5,59%	1,66%	41,93%
5	KSP Sentosa Pacitan	-5,52%	125,50%	92,08%
6	KSP Mulya dana, Pacitan	2,13%	22,56%	51,67%
	RATA-RATA	3%	36%	42%

KINERJA KEUANGAN RESPONDEN

POSISI KINERJA PER -30 JUNI 2020

No.	NAMA KOPERASI	RENTABILITAS	LIKUIDITAS	PERMODALAN
1	KSPPS Kanindo Jatim	0,33%	17,05%	21,44%
2	KSP Berkah Sesama Jatim	4,57%	47,12%	26,94%
3	KSP sukses Karya Bersama	1,56%	7,85%	74,10%
4	KSU Usaha Kesejahteraan Keluarga	17,05%	6,98%	41,45%
	RATA-RATA	5,58%	19,75%	40,98%

KINERJA KEUANGAN RESPONDEN

PERUBAHAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2019 ke 30 Juni 2020

NO	NAMA KOPERASI	KAS+BANK (IDR)	PIUTANG (IDR)	SHU (IDR)	ASET (IDR)
1	KSPPS KANINDO JATIM	-4.31 milyar	6.35 milyar	-440 juta	1.89 milyar
2	KSP BERKAH SESAMA JATIM	-13.99 milyar	9.50 milyar	-5.60 milyar	-2.13 milyar
3	KSP SUKSES BERSAMA	23.40 juta	250.53 juta	-44.64 juta	237.12 juta
4	KSU USAHA KESEJAHTERAAN KELUARGA	28.53 juta	-3.92 juta	-7.43 juta	24.60 juta

KONDISI LAPORAN KEUANGAN

	Koperasi di Jatim	Koperasi di Sulsel
Format Laporan Keuangan	Relatif sudah menggunakan pendekatan PSAK 27	Belum memiliki format yang baku. <u>KLIK</u>
Teknologi	Tk.Provinsi menggunakan aplikasi Tk.kabupaten menggunakan Excell	Tk. Provinsi dan Tik.Kabupaten belum menggunakan aplikasi komputer
Periode Laporan	Tk. Provinsi 3 bulan sekali Tk. Kabupaten 1 th	Tk. Provinsi 3 bulan sekali Tk. Kabupaten 1 th
Keakuratan	Ditemukan 1 Koperasi yang tidak memiliki lap. PHU	Lap.Keu Kop.Prov.Ada 1 KSPPS menggunakan Lap. Konven, ada 2 KSP tidak relevan Koperasi Kab.Tidak memiliki laporan USP.

— KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



HASIL SURVEY: KOPERASI KABUPATEN

Ada beberapa temuan terkait Kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pengembangan Koperasi, yaitu:

1. Kabupaten Pacitan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dana Bergulir yang memberikan pinjaman kepada Koperasi;
2. Semua Koperasi responden telah memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan, kecuali di Kabupaten Bulukumba pelaksanaan Ijin USP belum ada;
3. Tidak semua Koperasi responden sudah mendapatkan PENKES ;
4. Koperasi Provinsi terbuka untuk beroperasi di wilayah kabupaten, namun dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
5. Semua responden belum memiliki aplikasi computer Koperasi atau CORE SYSTEM dalam mengelola akuntansi dan keuangannya.

HASIL SURVEY: KOPERASI PROVINSI

Ada beberapa temuan terkait Kebijakan Pemerintahan yaitu:

1. Provinsi Jawa timur memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dana Bergulir yang memberikan pinjaman kepada Koperasi;
2. Semua Koperasi responden telah memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi
3. Koperasi Nasional terbuka untuk beroperasi di wilayah Provinsi, namun dengan ketentuan dan persyaratan;
4. Provinsi Jawa Timur membentuk Komite Pengawas KSP yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dengan beranggotakan dari dinas/Perguruan tinggi/Dekopin/Koperasi sekunder.
5. Koperasi Provinsi di Jawa Timur sudah menggunakan Program Aplikasi computer dengan CORE SYSTEM Online. Kondisi Koperasi di Provinsi sulsel belum ada yang menggunakan Aplikasi berbasis ONLINE.
6. Semua Koperasi di tingkat Provinsi telah mendapatkan Penilaian Kesehatan dari Dinas Koperasi setempat.

BIDANG PERIZINAN

NO

PEMERINTAH DAERAH

1

Menjadikan Ijin USP sebagai pintu masuk untuk membuat **komitmen bersama** antara pengurus-pengawas dalam pernyataan integritas untuk mengelola usaha dan organisasi secara baik & benar

2

Memastikan seluruh struktur dan infrasatruktur terpenuhi

BIDANG LAYANAN & PENGEMBANGAN

NO

PEMERINTAH DAERAH

1

Menerbitkan buku panduan pengembangan produk koperasi

2

Memberikan sertifikasi kepada provider IT dalam memberikan Layanan Komputerisasi sistem akuntansi koperasi;

3

Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi bagi pengurus dan pengelola koperasi

4

Perijinan product line koperasi ke dinas

BIDANG KEUANGAN

NO	KOPERASI	PEMERINTAH
1	Melakukan kegiatan Cost reduction dan Cost Cutting untuk pos-pos sekunder;	Memberikan fasilitasi Temu kemitraan antara Koperasi dan Lembaga Keuangan lain (Bank);
2	Membuat komitmen standby Loan dengan Lembaga Keuangan;	Membuat Produk Tabungan Koperasi Bersama “Tabungan Bergaransi”
3	Menjual asset-asset non-produktif untuk menambah likuiditas;	Memberikan Modal penyertaan ke Koperasi.
4	Selektif dalam memberikan pembiayaan/pinjaman baru.	

BIDANG REGULASI

NO	PEMERINTAH DAERAH	PEMERINTAH PUSAT
1	Pendidikan dan Pelatihan SDM Berbasis Kompetensi bagi Pengawas Koperasi tk.Provinsi dan Kabupaten. (SDM)	Kebijakan KEMENKOP dalam melakukan sertifikasi Penyedia Teknologi core system Koperasi; (Teknologi Informasi)
2	Penyediaan Penilaian Kesehatan berbasis ONLINE. (Teknologi Informasi)	Kebijakan KEMENKOP dalam penggunaan SERTIFIKAT PENKES dalam layanan terhadap Koperasi; (Governance)
3	Pelaksanaan Ijin Usaha Simpan Pinjam dan surveilensi perijinan. (Kelembagaan)	Kebijakan penggunaan sebahagian Dana SHU untuk pengembangan SDM Pengelola; (SDM)
4	Kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk mendirikan UPT Dana Bergulir memberikan stimulus pinjaman dalam upaya membantu likuiditas KSP yang terdampak; (Permodalan)	Mandatory pembentukan APEX (Koperasi Sekunder). (Permodalan dan Likuiditas)

NO	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH	JANGKA PANJANG
1	Koperasi perlu diberikan penguatan tata-kelola melalui penggunaan aplikasi computer yang terstandarisasi oleh Dinas koperasi.	Penyusunan Pedoman Pengembangan Produk Koperasi;	Membuat produk simpanan Bersama untuk mengembangkan portofolio produk Koperasi
2	Mengembangkan layanan penilaian Kesehatan berbasis online sebagai fungsi pengawasan	Mendorong terbentuknya Unit Pelaksana teknis (UPT) untuk Pengelolaan Dana Bergulir tingkat Provinsi. (Jika belum ada)	Perlu dibentuk fungsi APEX di tingkat Provinsi.
3	Memberikan pelatihan berbasis kompetensi kepada Pejabat Pengawas dan pengawas/pengurus/Pengelola Koperasi	Pembentukan Kerjasama dengan Lembaga Jasa Audit Koperasi tingkat Provinsi.	Membentuk biro informasi peminjam bermasalah Koperasi Provinsi.
4	Memberikan pelatihan berbasis kompetensi kepada Pejabat Pengawas dan pengawas/pengurus/Pengelola Koperasi	Membentuk Asosiasi Koperasi dan atau Koperasi sekunder yang berfungsi sebagai media koordinasi dan advokasi terhadap primernya,	Melakukan Kerjasama dengan Dukcapil untuk membangun Know Your Customer (KYC) anggota Koperasi.



Hubungi kami:

Irawan Kristianto

Economic Growth Expert-
EGSA

(ikristianto@devtechsys.com)



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE